

Ariel Heriyanto:

"Jangan Menganggap Masyarakat Tong Kosong"

SU tentang OTB dan PKI terus di bicarakan orang hingga kini. Ada yang menanggapi secara serius, ada pula yang serampangan. Ariel Heriyanto, 41 tahun, adalah dosen Program Pasca Sarjana Universitas Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Dalam kemelut di UKSW, doktor antropologi dari Monash University ini berada dalam kelompok Pro Demokrasi, bersama Arief Budiman dan George Aditjondro. Ayah dua anak ini dikenal sebagai orang yang banyak mencurahkan perhatian pada fenomena kelas menengah dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Banyak tulisannya yang dimuat dalam media massa memperlihatkan pandangannya yang kritis dan tajam.

Berikut ini hasil wawancara Media dengan Ariel mengenai isu OTB serta kecenderungan munculnya organisasi-organisasi baru di masyarakat.

Beberapa waktu lalu, bagaimana dimuat dalam sebuah majalah mingguan, tiga orang dosen UKSW dituding PKI. Menurut Anda sasarannya kemana?

Begini. Mungkin ada beberapa faktor yang sekaligus bermain disini. Pertama, ada sejumlah pejabat merasa terpojok karena kesulitan mencari bukti bahwa OTB itu benar ada. Faktor kedua, saya menduga keras, bahwa soal PKI yang ditulis oleh sebuah majalah berita mingguan (ia menyebut nama sebuah majalah mingguan di Jakarta—red), itu cuma soal cari duit saja. Untuk mengontrol oplan besar. Dari segi bisnis, cerdas sekali. Cuma dari segi etika dan politik, buat saya itu menjijikkan. Bagaimana kita bisa mengukut berapa biaya yang harus dibayar ketiga orang yang belum jelas bersalah itu. Setahu saya, mereka belum pernah diadili dan dibuktikan kesalahannya seperti tuduhan majalah itu. Mereka juga belum diberi kesempatan membela diri secara hukum, kalau mereka memang bersalah.

Apakah Anda percaya pendapat umum bahwa sasarannya bukan mereka saja?

Betul. Saya percaya, tapi apa untungnya sih? Dugaan saya, sasaran majalah itu cuma cari duit. Dan itu sangat menjijikkan. Apalagi kalau kita lihat manipulasi antara isi, sampul depan dan iklan. Iklan dan sampul depannya menyatakan: tiga dosen di UKSW terlibat PKI. Tapi isinya, tak ada yang mengatakan begitu. Isinya, mereka terlibat dalam sebuah organisasi massa yang bukan

partai politik PKI. Selain itu, salah satu dari mereka membantah tentang keterlibatannya di ormas dan satu lagi tak mau berkomentar. Bagaimana bisa dikatakan mereka terlibat PKI? Itu kan manipulasi.

Isu OTB menurut Anda bagaimana?

Banyak hal sebetulnya yang bisa kita bicarakan soal OTB itu. Biasanya yang dibicarakan orang hanya siapa yang melempar isu, kemudian dicari apa motivasi dan tujuannya. Kalau saya tidak demikian. Saya tidak peduli siapa yang melempar isu dan apa motivasinya. Tapi yang saya pedulikan justru sasarannya, bagaimana masyarakat menanggapi dan mencerna isu itu. Apakah mereka menjadi takut, kalut, gelisah atau terpingkal-pingkal. Atau mungkin malah tak peduli sama sekali. Bagi saya ini yang menarik. Jangan menganggap bahwa masyarakat menjadi tong kosong yang bisa diisi apa saja.

Maksud Anda, itu dalam konteks bagaimana?

Kalau saya perhatikan, kondisi masyarakat di tahun 1995 ini jauh berbeda dengan tahun 1970 atau 1980-an. Pertama, dapat kita lihat reaksi orang. Kebanyakan orang tak percaya lagi akan bahaya komunisme. Kedua, orang justru marah dan menantang. "Tunjukkan! Kalau tidak benar, saya gugat kamu." Coba Anda lihat di tahun 1970-an. Mana ada orang yang berani berkata begitu. Yang ketiga, orang menjadi tak peduli. Ini yang menurut saya menarik. Isu OTB sama terus dari atas, cuma yang beda misinya. Menurut saya soal ini jangan sampai diabaikan.

Tiga orang yang diduga itu di UKSW sebagai apa?

Tiga orang ini yang mana, kami nggak tahu. Kita bisa menduga-duga. Dan misalnya disuruh memas-tikan, saya nggak mau juga. Apa untungnya sih? Dan kalau memang salah benar, daripada dagang gosip, mbok diajukan ke pengadilan. Kalau saya mencari-cari, saya ikut termakan gosip. Saya tak mau dan tidak mau tahu. Kalau saya terima pernyataan, saya bilang saya tak tahu. Tanya majalah yang menulis itu dong. Kalau ada, kenapa memakai nama samaran? Apa dia melindungi? Kalau melindungi, itu iklannya sama sekali tidak benar. Makanya, buat saya yang menarik, pertanyaannya bukan diarahkan kepada ketiga orang ini. Bukan hanya ke majalah itu. Tapi bagaimana masyarakat melihat situasi semacam ini. Mereka

marah. Saya terima telepon dari banyak orang. Semua marah. Terasuk, saya terima juga telepon dari seseorang wartawan majalah yang menurunkan berita itu. Ia juga marah. Dia protes keras dan bertanya pada saya, apa yang harus dia lakukan.

Tapi reaksi masyarakat terhadap OTB lalu dinilai malah mengaburkan masalah sebenarnya. Seperti pendapat para pejabat, bahwa permasalahan sebenarnya bukan

.....

Sudah menjadi tugas pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan bernegara. Tapi, seharusnya munculnya ormas-ormas bukan merupakan hadiah dari pemerintah.

.....

OTB itu sendiri. Bagaimana pendapat Anda?

Ada dua hal penting. Kalau dianggap mengaburkan, masyarakat jadi bingung. Tapi saya lihat: tidak. Masyarakat tahu persis. Masalahnya, ada yang berusaha membingungkan orang. Karena mereka tahu betul bahwa mereka tidak bingung, tapi dia marah. Karena, mereka tahu ada yang tak benar. Maka itu saya bilang, yang saya perhatikan bukan pelempar isu. Dalam konteks ini, saya ingin membicarakan kedewasaan politik Indonesia. Seringkali orang mengatakan Indonesia belum demokratis. Belum siap ini, belum siap itu. Yang benar saja. Kita sudah cukup dewasa, terutama anak-anak muda-muda, yang tak ditakut-takuti trauma tahun 1965. Karena mereka belum lahir.

Ada yang mengkhawatirkan, komunis masih membahayakan masyarakat Indonesia. Padahal, ideologi itu sudah tak memiliki pasar lagi, tidak laku. Ini selalu menjadi pertentangan, kan?

Memang. Tapi pertentangan itu selalu dipahami masyarakat dengan jelas. Menurut saya, yang terlibat pertentangan cuma mereka, bukan masyarakat. Yang membingungkan itu ucapan-ucapan pejabat. Masyarakat tak bingung.

Isu OTB dimunculkan pada saat tahanan G30S/PKI dikeluarkan dari penjara. Apakah ini kebetulan?

Terlalu kecil. Dalam pengertian, memang pembebasan itu bisa mendukung munculnya isu OTB tersebut. Tapi dengan atau tanpa pembebasan itu, isu komunis atau OTB masih akan diteruskan orang-orang masa lampau yang memiliki bahasa demikian.

Mengapa? Mereka memang dibesarkan dengan bahasa itu. Jangan lupa, buat mereka, pengalaman adalah segala-

.....

Sudah menjadi tugas pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan bernegara. Tapi, seharusnya munculnya ormas-ormas bukan merupakan hadiah dari pemerintah.

.....

galanya. Mereka merasa anak muda sekarang tak mengerti sejarah. Itu yang membuat mereka marah. Mereka merasa bahwa generasi muda tak mengetahui kekejaman atau kejahatan komunis pada masa itu. Dan ucapan itu, menurut saya, tidak seratus persen salah, lho. Ada juga benarnya. Tapi masalahnya, apakah anak-anak muda ini harus tahu? Yang dihadapinya bukan lagi tahun 1960-an, tetapi tahun 1990 atau tahun 2000. Mereka harus mengetahui hal-hal lain.

Di luar itu, nampaknya pemerintah tak main-main dengan isu OTB.

O, iya. Mereka serius, dan saya setuju. Tapi sekali lagi, tinggal bagaimana membacanya. Di sini kita diuji. Makanya saya selalu bilang, dalam dunia politik, sastra, kita jangan selalu berpusat pada pengarangnya. Tapi pembacanya. Karena ini bukan benda mati. Dan kadang-kadang dia lebih hebat menentukan bukannya daripada penulisnya.

Menurut Anda, masyarakat kini sudah pintar membaca situasi. Bukti apa?

Saya katakan bahwa saya besar hati melihat kemampuan masyarakat mengunyah dan tak hanya sekedar menelan berbagai isu. Walau jumlahnya kecil, namun sekarang kita tak bisa mengabaikannya. Kedua, di tahun 1970-an saya tak melihat masyarakat yang begitu bera-

ni. Zaman itu, kalau ada tuduhan PKI, orang hanya diam. Tapi kini, orang akan menggugat di pengadilan.

Bagaimana dampak isu OTB yang dilansir para pejabat terhadap masyarakat?

Mereka memang ngeri betul. Tapi harus diingat, jumlah orang kecil yang di desa, yang jauh dari media massa itu makin lama makin habis karena mereka berbondong-bondong ke kota. Jadi, yang melayani kita dengan parabola, itu luar biasa jauhkauannya. Itu kapitalisme lagi, dalam jumlah yang luar biasa besar. Dan ini tak hanya terjadi di Indonesia. Di Asia dan di mana-mana. Dulu orang bilang 80 persen itu desa. Tapi kini tak demikian lagi. Yang dari desa pergi ke kota. Sementara desanya sendiri makin lama menjadi kota. Dan itu bukan tentara atau aktivis yang membuat. Yang tak kalah penting punya peran di desa adalah LSM-LSM yang bekerja untuk daerah. Kita akui dengan segala macam kekurangannya. Saya banyak menjumpai di kota-kota seperti Jakarta, banyak orang daerah yang datang ke kota sebagai sopir taksi misalnya. Mereka ngomongnya sudah masalah presiden, menteri, yang kalau di daerah itu hanya diomongin aktivis.

Belakangan ini muncul berbagai ormas baru. Gejala apa ini?

Munculnya berbagai macam ormas belakangan ini tak perlu dikhawatirkan. Saya cenderung menyambut gembira dan positif. Sebab, dengan begitu menunjukkan bahwa hak-hak berserikat betul-betul dilindungi oleh UUD. Jadi, ini wajar saja. Justru reaksi masyarakat kita yang tak wajar. Karena selama ini menderita, begitu muncul berbagai macam ormas, masyarakat kaget. Meskipun demikian, saya tak melihat ormas-ormas itu akan membawa banyak perubahan, atau akan mengantarkan ke era "Ratu Adil".

Mengapa?

Karena, struktur yang ada saat ini tak memungkinkan munculnya oposisi. Coba lihat saja Forum Demokrasi yang mencoba melakukannya, kini sudah gembos. Berbeda dengan kelahiran ormas-ormas, seperti bunga yang turun begitu saja dari langit, dan disambut dengan ketenangan yang abadi. Apalagi yang bisa diharapkan dari orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas untuk perubahan. Sebagaimana halnya ICMI? Sejauh mana independensinya? Semuanya kan turun dari atas. Bukan saya sinis terhadap ICMI.

Sebab intelektual Islam juga berhak menggalang sesuatu yang selama ini tak bisa mereka peroleh. Tapi, ormas-ormas itu masih dipertanyakan basisnya di bawah. Sampai sejauh mana mereka mewakili persoalan yang bergolak di lapisan bawah masyarakat?

Bagaimana dengan PCPP?

Tampaknya tak jauh berbeda, meski harus dibuktikan lagi. Tapi, kehadiran mereka harus disambut. Orang boleh beda pendapat dengan kita. Saya tak yakin ormas-ormas itu bisa memenuhi kepentingan saya, tapi upaya mereka perlu dihargai. Kita patut berterima kasih atas apa yang terjadi belakangan ini, tapi — sekali lagi — semua harus dikembangkan. Tugas pemerintah adalah memberikan kesempatan yang sama pada semua pihak untuk memunculkan diri.

Ada pendapat, munculnya PCPP adalah upaya pemerintah untuk menyeimbangkan konstelasi akibat terlalu kuatnya ICMI. Apa pendapat Anda?

Sangat mungkin begitu. Dan memang sudah menjadi tugas pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan bernegara. Seharusnya, munculnya ormas-ormas baru itu bukan merupakan hadiah dari pemerintah, tapi kewajiban pemerintah.

Apakah ormas-ormas itu hanya akan memperjuangkan kepentingan kelompoknya saja?

Apa jeleknya memperjuangkan kepentingan kelompok? Dari perjuangan kepentingan kelompok-kelompok itulah orang akan terlibat dalam proses demokratisasi. Yang penting adalah

bagaimana kelompok-kelompok ini dilindungi prosedur hukum yang jelas. Saat ini kan tidak ada, sehingga seolah-olah yang berlaku adalah hukum rimba.

Menurut Anda, apakah kemunculan ormas-ormas — yang umumnya mengaku tak berorientasi pada kepentingan politik — akan punya sasaran politik?

Jelas sekali ormas-ormas itu punya akses politik nantinya. Tapi paling tidak, ini awal dari perlindungan kembali hak-hak masyarakat untuk berserikat. Kalau sekarang mungkin datangnya baru dari kalangan senior, atau dari kalangan elit politik yang sedang berkuasa, tapi nanti harus dikembangkan dan diluaskan terutama pada masyarakat yang selama ini tak memperoleh kesempatan.

